



**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ROB MELALUI PROGRAM
RELOKASI DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Dinda Azarine¹, Ida Hayu Dwimawati²

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Tidal flooding (rob) continues to affect coastal areas in Kecamatan Sayung, resulting in a decline in housing quality for 543 households in 2023. The Government of Demak Regency subsequently enacted Regent Regulation Number 4 of 2024 concerning Guidelines for the Implementation of Housing Construction and Rehabilitation Assistance for Disaster Victims through the Relocation Program. The relocation program introduces several requirements that potentially create disparities in assistance among disaster-affected residents. This study aims to analyze the success of the policy on housing construction and rehabilitation assistance for disaster victims through the relocation program in fulfilling the need for adequate housing for low-income families and communities in Sayung District, Demak Regency, as well as to examine the factors hindering its implementation. This study employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation and interviews using purposive sampling techniques. The study applies William N. Dunn's Policy Evaluation theory and Subarsono's concept of policy implementation barriers. The results show that the policy of providing housing construction and rehabilitation assistance for disaster victims through the relocation program has not yet succeeded in fulfilling the need for adequate housing for low-income families and communities in Sayung District, Demak Regency because the policy has not been effective, efficient, sufficient, equitable, responsive, and appropriate in addressing the provision of adequate housing. The obstacles encountered include policy complexity, limited supporting resources, and the socio-economic conditions of the target groups. The recommendations include strengthening cross sectoral synergy in implementing the relocation program, expanding funding sources through partnerships with the private sector, increasing public outreach and education regarding the relocation program, and strengthening the economic empowerment of communities after relocation.

Keywords: *Tidal Flooding (rob), Relocation, Adequate Housing*

ABSTRAK

Bencana banjir rob terus melanda wilayah pesisir di Kecamatan Sayung yang berdampak pada penurunan kualitas hunian sejumlah 543 Kepala Keluarga di Tahun 2023. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Demak untuk menetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi. Program Relokasi yang dirancang menghadirkan syarat kepemilikan lahan dan modal bagi penerima manfaat yang berpotensi menimbulkan ketimpangan bantuan antar warga yang terdampak bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak serta menganalisis faktor penghambat yang menyertainya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn dan konsep Faktor Penghambat Kebijakan Subarsono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi belum berhasil memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak karena tidak memenuhi pada aspek efektivitas, aspek efisiensi, aspek kecukupan, aspek pemerataan, aspek responsivitas dan aspek ketepatan. Faktor penghambat yang menyertai yaitu kompleksitas kebijakan, keterbatasan sumber daya pendukung kebijakan, dan kondisi ekonomi sosial kelompok sasaran. Adapun saran yang diberikan meliputi penguatan sinergitas lintas sektor dalam pelaksanaan Program Relokasi, perluasan sumber pembiayaan melalui kemitraan dengan sektor swasta, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Program Relokasi, serta penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca relokasi.

Kata Kunci: Bencana Banjir Rob, Relokasi, Rumah Layak Huni

PENDAHULUAN

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah memicu pemanasan global yang mengganggu keseimbangan pola iklim di bumi. Suhu atmosfer dan lautan yang terus meningkat mempercepat pencairan lapisan es dan salju di Kutub Utara maupun Kutub Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa berdasarkan analisis WMO, suhu rata-rata bumi secara global pada tahun 2024 tercatat sebesar $1,55\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,13\text{ }^{\circ}\text{C}$, lebih tinggi dibandingkan suhu pada periode praindustri (1850–1900). Kondisi ini menunjukkan bahwa bumi semakin mendekati ambang batas pemanasan global yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, yaitu menjaga kenaikan suhu di bawah $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ untuk mencegah dampak terburuk perubahan iklim. Salah satu dampak terburuk dari perubahan iklim adalah meningkatnya volume perairan global yang turut mempercepat kenaikan permukaan laut.

Kenaikan permukaan laut diproyeksikan berdampak langsung pada lebih dari 81 ribu kilometer garis pantai Indonesia dan mengancam lebih dari 60% penduduk yang tinggal di wilayah pesisir (Le Bars et al., 2017; Siagian, 2023). Indonesia menjadi salah satu negara paling rentan karena memiliki garis pantai yang sangat panjang dan populasi pesisir terbesar kelima di dunia. Hingga akhir tahun 2024, BMKG memaparkan bahwa anomali tinggi muka laut (TML) di wilayah Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Data tersebut diperoleh dari pengamatan satelit TOPEX/Poseidon (T/P), Jason-1, Jason-2, Jason-3, dan Sentinel-6MF yang mencatat laju kenaikan sebesar $4,3 \pm 0,4\text{ mm}$ per tahun. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 18.000 kilometer garis pantai masuk kategori rentan terhadap kenaikan tinggi muka laut.

Pantai Utara (Pantura) Jawa merupakan salah satu kawasan pesisir yang berpotensi memiliki kerentanan akibat perubahan iklim. Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 18.882 hektar lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sebagian dari alokasi tersebut berada di wilayah pesisir yang kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri. Pengembangan tersebut berkaitan dengan perubahan tata guna lahan di sejumlah wilayah pesisir Pantura. Situasi ini memperlihatkan adanya tumpang tindih kepentingan antara pemanfaatan ruang untuk pengembangan ekonomi dan kerentanan yang dimiliki wilayah pesisir.

Tabel 1.1 Jumlah Industri di Pantai Utara Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Jumlah Industri					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Demak	3880	3880	9349	12295	12939	13247
2. Kendal	5337	5337	6108	6830	6989	7388
3. Pati	2039	2039	2976	4715	6109	7121
4. Semarang	2588	2588	3848	4594	5068	5967
5. Kudus	2614	2196	3339	4521	4719	4914
6. Tegal	1015	1015	1790	2632	1701	3102
7. Rembang	11709	11622	1911	2660	3045	3401
8. Batang	1939	1834	759	1861	2472	3022
9. Pemalang	8254	8254	10894	12422	1321	1539
10. Brebes	1386	1154	312	440	582	779

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah industri di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah pada periode 2019–2024. Kabupaten Demak mencatat lonjakan paling besar dari 3.880 industri pada tahun 2019 menjadi 13.247 pada tahun 2024, menempatkannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri di Pantura. Pertumbuhan pesat ini mengindikasikan intensifikasi aktivitas industri di wilayah pesisir yang secara ekologis rentan terhadap abrasi dan banjir rob. Keberadaan kawasan industri turut meningkatkan aktivitas pemompaan air tanah karena kebutuhan air industri lebih besar dibandingkan rumah tangga. Kondisi tersebut mendorong terjadinya pemompaan air tanah secara berlebihan memicu terjadinya penurunan muka tanah (Suryanti & Marfai, 2025).

Tabel 1.2 Panjang Garis Pantai dan Luas Wilayah Terdampak Rob

No	Kecamatan	Panjang Garis Pantai (km)		Luas Wilayah (ha)	
		2013	2021	2013	2021
1	Kecamatan Bonang	7,5	7,7	8.713	8.726
2	Kecamatan Karang Tengah	4,9	5,3	5.648	5.628
3	Kecamatan Sayung	11,6	57,4	8.603	6.679
4	Kecamatan Wedung	27,5	31,6	12.952	13.052
TOTAL		51,55	102,03	35.916	34.085
SELISIH		50,5		-1.831	

Sumber: Dinptaru Kab. Demak (2021); RPJPD Kabupaten Demak 2025 - 2045

Tabel 1.2 menunjukkan perubahan garis pantai dan luas wilayah dalam kurun tahun 2013 hingga tahun 2021. Panjang garis pantai di Kabupaten Demak meningkat tajam dari 51,55 km menjadi 102,03 km, sementara luas wilayah total menyusut 1.831 hektare. Sementara itu, Kecamatan Sayung menjadi kawasan yang mengalami perubahan paling drastis dibandingkan wilayah pesisir lainnya. Panjang garis pantainya melonjak dari 11,6 km pada tahun 2013 menjadi 57,4 km pada tahun 2021, sementara luas wilayahnya menyusut hingga 1.924 hektare.

Berdasarkan kajian Badan Informasi Geospasial (BIG), luas area yang mengalami erosi sejak tahun 1994 mencapai 2.116,54 hektare. Dalam periode yang sama, garis pantai mengalami kemunduran sejauh sekitar 5,1 kilometer. Tingkat abrasi tercatat jauh lebih tinggi, yaitu berkisar antara 0,3 hingga 553,3 meter per tahun. Sementara itu, laju akresi hanya berada pada kisaran 0,1 hingga 20,4 meter per tahun menunjukkan ketidakseimbangan signifikan antara pengikisan dan penambahan daratan. Pada rentang tahun 2020 sampai 2021, Kecamatan sayung tercatat memiliki laju Penurunan Muka Tanah (PMT) tertinggi sebesar 21,380 cm/tahun. Kemudian meningkat pada rentang tahun 2022 sampai 2023 sebesar 41,788 cm/tahun.

Tabel 1.3 Desa Terdampak Banjir Rob Kecamatan Sayung Tahun 2023

No	Desa	Kecamatan	KK
1	Timbulsloko	Sayung	165
2	Tugu	Sayung	51
3	Surodadi	Sayung	48
4	Gemulak	Sayung	61
5	Sidogemah	Sayung	129
6	Sriwulan	Sayung	66
7	Bedono	Sayung	23
Total			543

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak (2023)

Tabel 1.3 menunjukkan rincian desa-desa di Kecamatan Sayung yang terdampak banjir rob pada tahun 2023 dengan total 543 kepala keluarga (KK). Data tersebut memperlihatkan bahwa dampak banjir rob tersebar di tujuh desa, yaitu Timbulsloko, Tugu, Surodadi, Gemulak, Sidogemah, Sriwulan, dan Bedono. Desa Timbulsloko tercatat sebagai wilayah dengan jumlah terdampak terbesar yaitu 165 KK, diikuti Desa Sidogemah sebanyak 129 KK. Sementara itu, desa lain seperti Sriwulan, Gemulak, Tugu, dan Surodadi menunjukkan jumlah terdampak yang relatif lebih kecil namun tetap signifikan dalam jumlah puluhan kepala keluarga. Perbedaan jumlah terdampak antar desa tersebut menggambarkan variasi tingkat paparan banjir rob di wilayah pesisir Kecamatan Sayung pada tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan rob sebagai jenis bencana resmi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Demak. Sejalan dengan penetapan rob sebagai bencana resmi serta komitmen kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan upaya penanggulangan rob melalui pendekatan pascabencana melalui Dinas Perumahan dan Permukiman. Pelaksanaan tugas tersebut mengacu pada Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah dan rehabilitasi rumah korban bencana dilaksanakan melalui Program Relokasi kepada korban bencana atau bukan korban bencana yang berpotensi menimbulkan bahaya apabila tetap dihuni. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan sejumlah kriteria penerima bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana pada Pasal 7 ayat (4), meliputi:

- a. warga masyarakat Daerah yang berdomisili tetap (penduduk) dan secara nyata tinggal dilokasi tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. menempati rumah yang terdampak dan satu-satunya yang dimiliki;
- c. rumah tidak berstatus sebagai rumah sewa atau disewakan;
- d. rumah bukan termasuk rumah/asrama milik suatu instansi;
- d. rumah tidak berdiri di wilayah/daerah larangan pemerintah;
- e. rumah dan tanah tidak dalam status sengketa;
- f. memiliki tanah dengan alas hak yang sah, dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/SPPT/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
- g. untuk Pembangunan Rumah Relokasi penerima bantuan memiliki lahan baru yang sesuai peruntukannya, hak milik, dan dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah;
- h. tidak mendapat bantuan serupa dari sumber manapun pada tahun berjalan;
- i. sanggup melaksanakan dan menyelesaikan bantuan secara swadaya.

Ketentuan penerima manfaat dalam Kebijakan Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana disusun untuk menjamin ketepatan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan. Pada tataran implementasi, persyaratan kepemilikan lahan berpotensi menghadirkan persoalan baru bagi kelompok masyarakat yang justru menjadi sasaran utama program. Persoalan yang muncul berkaitan dengan keterbatasan akses akses keluarga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah yang secara struktural sulit atau bahkan tidak memiliki aset tanah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana. Akibatnya, kelompok rentan berpotensi berada pada posisi yang terpinggirkan dalam proses pemulihan pasca bencana.

Mengacu dari seluruh kondisi yang telah dipaparkan, setidaknya ada dua permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Pertama, banjir rob terus menggerus kehidupan dan memperburuk kondisi permukiman masyarakat yang belum tertangani secara menyeluruh. Kedua, Program Relokasi yang dirancang menghadirkan syarat dan ketentuan bagi masyarakat penerima manfaat yang berpotensi menimbulkan beban finansial bagi kelompok yang justru menjadi kelompok sasaran. Maka dari itu pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak banjir rob serta faktor penghambat Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

KAJIAN TEORI

A. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi menurut William N. Dunn sebagai proses penaksiran, pemberian nilai, atau penilaian terhadap hasil suatu kebijakan untuk mengetahui tingkat pencapaiannya (Akbar & Mohi, 2018). Evaluasi merujuk pada kegiatan menilai hasil kebijakan dan program dengan menggunakan ukuran atau kriteria tertentu. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan menghasilkan manfaat atau nilai bagi kelompok sasaran. Dunn mengemukakan enam kriteria yang menjadi dasar dalam menilai kebijakan publik, antara lain:

1. Efektivitas
Kemampuan suatu alternatif kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan serta mencapai tujuan dari dilaksanakannya suatu tindakan.
2. Efisiensi
Jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan
Hasil yang dicapai kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang melatarbelakangi adanya masalah.
4. Perataan
Perataan berkaitan dengan sejauh mana manfaat dan beban kebijakan didistribusikan secara adil pada kelompok masyarakat yang berbeda.
5. Responsivitas
Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai masyarakat atau kelompok sasaran.
6. Ketepatan
Ketepatan berkaitan dengan seberapa jauh hasil yang diinginkan dalam suatu kebijakan berguna bagi masyarakat.

B. Faktor Penghambat Kebijakan

Subarsono menyatakan bahwa kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang digunakan sebagai dasar dalam menilai arah dan kinerja kebijakan (Meutia, 2017). Kerangka kerja tersebut mencerminkan bentuk intervensi pemerintah dalam menangani permasalahan publik melalui pemanfaatan berbagai instrumen kebijakan yang tersedia. Subarsono menyebutkan bahwa kerangka kerja kebijakan terbentuk dari beberapa variabel, antara lain:

1. Tujuan yang akan dicapai
Hasil yang hendak diwujudkan melalui kebijakan. Semakin kompleks tujuan kebijakan, semakin sulit kebijakan mencapai hasil yang diharapkan.
2. Preferensi nilai dalam pembuatan kebijakan
Nilai-nilai atau kepentingan yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Semakin banyak nilai yang harus diakomodasi dalam suatu kebijakan, maka semakin sulit kebijakan tersebut diwujudkan.
3. Sumber daya pendukung kebijakan
Sumber daya merupakan berbagai dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, meliputi dana, fasilitas, serta infrastruktur lainnya.
4. Lingkungan kebijakan
Lingkungan mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi area pelaksanaan kebijakan
5. Strategi mencapai tujuan
Cara atau pendekatan yang dipilih untuk menjalankan kebijakan agar tujuan dapat tercapai. Pemilihan strategi, baik yang bersifat *top-down* maupun *bottom-up*, akan berdampak pada keberhasilan kinerja kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi kebijakan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah melalui Program Relokasi. Situs penelitian berada di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yaitu melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dan memiliki relevansi langsung pada program relokasi meliputi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dan warga terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Data yang digunakan berupa data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan dan regulasi pemerintah Kabupaten Demak. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi pada lokasi terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data secara deskriptif, serta penarikan kesimpulan yang didukung oleh penggunaan *software* Atlas ti 25. penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan Kebijakan Pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Keberhasilan Kebijakan Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Banjir Rob di Kabupaten Demak dinilai berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

a. Efektivitas

Efektivitas Kebijakan Pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi dianalisis melalui ketercapaian tujuh tujuan kebijakan yang ada di dalamnya. Pada tujuan mempercepat penanggulangan bencana yang memicu kenaikan kemiskinan belum sepenuhnya tercapai. Program Relokasi mampu menyediakan hunian lebih aman dan mengurangi beban biaya akibat kerusakan berulang. Namun, manfaat ekonomi belum dirasakan merata karena munculnya beban angsuran baru bagi sebagian warga. Pada tujuan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, Program Relokasi mampu menurunkan jumlah RTLH yang ditunjukkan pada tabel 3.1 serta peningkatan kualitas bangunan melalui penerapan Ruspin. Perubahan ini mencerminkan perbaikan kondisi fisik hunian masyarakat.

Tabel 3.1 Data Rumah Tidak Layak Huni Daerah di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2022 – tahun 2025

No	Desa	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Timbulsloko	165	149	149	125
2.	Tugu	51	51	51	51
3.	Surodadi	48	48	45	44
4.	Gemulak	61	61	57	57
5.	Sidogemah	129	129	129	129
6.	Sri Wulan	66	55	55	55
7.	Bedono	23	0	0	0
Total		543	493	486	461

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Demak (2025)

Pada tujuan melestarikan nilai kesetiakawanan sosial telah tercapai karena mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui swadaya dan kerja sama dalam pembangunan, sementara pada tujuan memotivasi peningkatan kualitas rumah layak huni belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan ekonomi dan kendala administratif masih menghambat sebagian warga. Di sisi lain, upaya menumbuhkan semangat gotong royong dalam pengentasan kemiskinan juga belum

optimal karena relokasi individu cenderung bersifat transaksional meskipun relokasi kolektif sudah menunjukkan adanya kerja sama. Berbeda dengan itu, tujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat telah tercapai melalui pemberian kewenangan dalam pengelolaan pembangunan yang mendorong efisiensi dan perputaran ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman juga tercapai karena akses infrastruktur dasar menjadi lebih baik dan membantu menekan pengeluaran masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Rob melalui Program Relokasi dinilai belum efektif karena terdapat beberapa tujuan yang belum tercapai secara optimal. Tujuan yang belum tercapai diantaranya mempercepat upaya penanggulangan bencana yang memicu kenaikan angka kemiskinan, memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni, menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum meratanya manfaat ekonomi yang diterima oleh seluruh penerima manfaat, masih adanya beban pembiayaan tambahan di luar bantuan yang diberikan, serta perbedaan kapasitas ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada kemampuan untuk merealisasikan pembangunan hunian yang layak.

b. Efisiensi

Pengkajian efisiensi dianalisis melalui besarnya biaya pelaksanaan kebijakan dan perbandingan manfaat yang diperoleh dan total biaya yang dikeluarkan dalam Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi. Biaya yang disalurkan pada bantuan Program Relokasi sebesar

Rp50.000.000 untuk setiap unit rumah yang dialokasikan khusus pada pengadaan material bangunan. Skema bantuan tersebut tidak mencakup kebutuhan lain seperti tenaga kerja, pondasi, serta pembelian tanah sehingga penerima manfaat harus menanggung berbagai biaya tambahan secara swadaya. Pengalaman penerima manfaat menunjukkan bahwa total pengeluaran pembangunan rumah dapat mencapai lebih dari dua kali lipat nilai bantuan yang diberikan. Besaran biaya yang harus dikeluarkan warga menunjukkan bahwa manfaat program sangat bergantung pada kemampuan penerima manfaat untuk menambah sumber daya di luar bantuan kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara besaran bantuan yang diberikan dengan kebutuhan biaya pembangunan rumah di lokasi relokasi.

Biaya yang harus ditanggung oleh warga jauh melampaui nilai bantuan yang disediakan oleh program. Situasi tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh dari kebijakan relokasi tidak sepenuhnya dihasilkan dari dukungan biaya program. Pelaksanaan kebijakan masih menuntut adanya pengeluaran tambahan yang cukup besar dari penerima manfaat agar pembangunan rumah dapat terealisasi. Hal ini menunjukkan Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi belum efisien dalam memenuhi rumah layak huni bagi keluarga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

c. Kecukupan

Kecukupan kebijakan dianalisis melalui ketercapaian hasil kebijakan dalam pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin yang terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi

belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan rumah layak huni karena bantuan yang diberikan bersifat stimulan dengan nominal terbatas sebesar Rp50.000.000 dan tidak disertai penyediaan lahan membuat pemenuhan rumah layak bergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing penerima. Akibatnya, keluarga miskin dan berpenghasilan rendah masih menghadapi kesulitan untuk menjadi penerima manfaat dari Program Relokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerentanan hunian masih tetap ada meskipun Program Relokasi telah dijalankan. Maka Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi belum dikatakan cukup. Hal ini disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan kelompok sasaran yang masih bergantung pada kemampuan tambahan dari penerima manfaat sehingga kebijakan belum sepenuhnya menjawab akar masalah atas kebutuhan yang muncul akibat permasalahan banjir rob.

d. Perataan

Perataan kebijakan dianalisis melalui prosedur penerima manfaat kebijakan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana melalui Program Relokasi. Program Relokasi menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi masyarakat penerima manfaat kebijakan. Pertama, penerima manfaat harus memiliki lahan di luar bangunan yang terkena bencana dengan peruntukan yang sesuai tata ruang wilayah (RTRW). Kedua, penerima bantuan harus menyiapkan modal untuk pembangunan rumah karena pembangunan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, kewajiban menempati rumah hasil bantuan relokasi agar tidak disalahgunakan untuk tujuan komersial.

Merujuk pada pandangan Dunn mengenai perataan yang menekankan distribusi manfaat dan beban secara adil

antar kelompok masyarakat, Program Relokasi menerapkan ketentuan yang seragam bagi seluruh sasaran kebijakan. Namun, keseragaman persyaratan tersebut tidak diikuti oleh kesetaraan kapasitas dalam pemenuhan persyaratan, sehingga akses terhadap manfaat kebijakan lebih mudah dijangkau oleh kelompok sasaran yang memiliki kemampuan finansial dan kepemilikan lahan. Maka Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi belum merata karena masih menyisakan ketimpangan akses terhadap manfaat bagi kelompok dengan keterbatasan kapasitas ekonomi dan kepemilikan lahan.

e. Responsivitas

Pada penelitian ini, responsivitas kebijakan dianalisis melalui daya tanggap Kebijakan pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Daya tanggap Program Relokasi tercermin dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang lebih aman dan layak sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat terdampak banjir rob. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan terkait ketersediaan lahan, aturan program, dan kondisi ekonomi penerima manfaat sehingga tidak seluruh kelompok sasaran dapat merasakan manfaat kebijakan secara optimal. Merujuk pada pandangan Dunn mengenai responsivitas yang menekankan kemampuan kebijakan dalam menanggapi kebutuhan aktual kelompok sasaran, kebijakan dikatakan responsif apabila mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Maka Program Relokasi belum dapat dikatakan sepenuhnya responsif karena masih menyisakan hambatan akses yang membatasi keterjangkauan manfaat bagi sebagian masyarakat terdampak.

f. Ketepatan

Ketepatan kebijakan dianalisis melalui kesesuaian tujuan kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat terdampak. Tujuan kebijakan Program Relokasi dirancang untuk menanggapi kebutuhan mendesak masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, khususnya dampak genangan rob dan terputusnya akses permukiman. Perencanaan program didasarkan pada identifikasi kondisi nyata warga, mulai dari pendataan jumlah terdampak hingga pemberian bantuan pembangunan rumah senilai Rp50.000.000, dengan tujuan meningkatkan keamanan hunian dan kualitas hidup masyarakat. Namun, manfaat program relokasi belum memberikan manfaat dan bernilai bagi masyarakat sasaran kebijakan. Persyaratan kepemilikan lahan dan kesiapan modal yang sulit dipenuhi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah. Maka Program Relokasi ini belum tepat karena kesesuaian antara tujuan yang dirancang dan kondisi aktual di lapangan masih menyisakan hambatan dalam keterjangkauan manfaat bagi sebagian masyarakat terdampak.

Faktor Penghambat Kebijakan Pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Faktor penghambat kebijakan pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana banjir rob melalui Program Relokasi dikaji melalui kerangka kerja dalam menilai arah dan kinerja kebijakan menurut Subarsono dalam (Meutia, 2017) Kerangka kerja kebijakan terbentuk dari beberapa variabel yaitu tujuan yang akan dicapai kebijakan, preferensi nilai dalam pembuatan kebijakan, sumber daya pendukung kebijakan, lingkungan kebijakan dan strategi mencapai tujuan kebijakan.

a. Tujuan yang akan dicapai kebijakan

Tujuan kebijakan dianalisis berdasarkan tingkat kompleksitas tujuan yang dirumuskan dalam Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi. Tujuan Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi mencakup berbagai sasaran yang saling berkaitan, mulai dari percepatan penanganan dampak bencana, penyediaan rumah layak huni, hingga peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah target yang berada di luar kapasitas langsung instansi pelaksana, seperti penanganan kemiskinan yang memerlukan keterlibatan lintas sektor.

Merujuk pada pandangan Subarsono mengenai kompleksitas tujuan, Program Relokasi memang menetapkan berbagai target secara bersamaan sehingga cakupan kebijakan menjadi semakin luas dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Kondisi ini menyebabkan ruang lingkup program melebar ke berbagai sektor, sehingga arah pencapaian tujuan menjadi lebih kompleks dan tidak terfokus pada satu sasaran utama saja. Maka kompleksitas tujuan dalam Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan secara optimal.

b. Preferensi Nilai dalam Pembuatan Kebijakan

Preferensi nilai dipahami melalui kompleksitas nilai yang diakomodasi dari Kebijakan pemberian Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana. Program Relokasi mengintegrasikan berbagai nilai sosial saling terkait, seperti gotong royong, kesetiakawanan sosial,

swadaya, dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan hunian. Orientasi nilai tersebut menjadi landasan dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat pelaksanaan program di tengah keterbatasan sumber daya yang tersedia. Mengacu pada pandangan Subarsono, keberagaman nilai yang diakomodasi dalam suatu kebijakan menentukan dinamika dan arah pelaksanaan suatu kebijakan. Nilai – nilai yang diakomodasi dalam Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi berperan dalam menopang pelaksanaan di tengah keterbatasan bantuan. Maka preferensi nilai dalam kebijakan pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana menjadi faktor pendukung keberlangsungan pembangunan hunian yang aman dan layak.

c. Sumber Daya Pendukung Kebijakan

Sumber daya pendukung kebijakan dilihat melalui kondisi ketersediaan anggaran serta sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Program Relokasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan anggaran dalam Program Relokasi masih terbatas. Alokasi bantuan sebesar Rp50.000.000 per unit hanya mencakup sebagian kebutuhan sehingga besaran bantuan belum mampu menutupi seluruh biaya pembangunan rumah. Upaya memperoleh tambahan dana dari pemerintah pusat sudah ditempuh namun terbentur pada status bencana karena rob tidak dikategorikan sebagai bencana dengan skala nasional. Keterbatasan anggaran daerah Kabupaten Demak menyebabkan penerima manfaat harus menyiapkan swadaya yang cukup besar. Akibatnya, realisasi Program Relokasi sangat bergantung pada kemampuan finansial penerima bantuan.

Penyediaan sarana dan prasarana masih terfragmentasi berdasarkan pola relokasi yang dilakukan, sedangkan penyediaan lahan sebagai prasarana utama tetap menjadi tanggung jawab penerima manfaat akibat keterbatasan kapasitas Pemerintah Kabupaten Demak. Merujuk pada pandangan Subarsono, sumber daya pendukung Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi belum memadai. Sumber daya yang terbatas menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan dan berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian tujuan Program Relokasi.

d. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan dikaji melalui gambaran kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung. kondisi sosial masyarakat terdampak banjir rob menjadi faktor yang memengaruhi kesiapan warga dalam mengikuti Program Relokasi. Ikatan emosional dengan tanah kelahiran, tanggung jawab terhadap makam keluarga, dan keterikatan dengan lingkungan sekitar membuat sebagian warga enggan meninggalkan desa meski kondisi fisik lingkungan tidak memungkinkan. Situasi ini menimbulkan pertimbangan tambahan yang memperlambat keputusan untuk pindah dan menambah kompleksitas pelaksanaan relokasi.

Sementara itu kondisi ekonomi yang dihadapi menyebabkan pilihan untuk tetap tinggal lebih dianggap realistis dibandingkan harus menanggung beban biaya relokasi, sebab keterbatasan dana menghambat penyediaan lahan serta pemenuhan kebutuhan tambahan di luar bantuan program. Kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang terjadi pada masyarakat terdampak banjir rob membentuk resistensi terhadap penerimaan manfaat dari Program Relokasi. Maka lingkungan kebijakan cenderung menjadi

faktor penghambat pencapaian tujuan Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

e. Strategi Mencapai Tujuan Kebijakan

Strategi mencapai tujuan Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi akan ditelaah menggunakan pendekatan yang digunakan dalam proses pembuatan kebijakan dan pendekatan yang diterapkan saat pelaksanaan Program Relokasi. Pendekatan dalam perumusan Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi ditempuh melalui bottom-up approach. Mekanisme perumusan kebijakan disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan permukiman layak terhindar dari bencana banjir rob. Dalam merealisasikan kebijakan tetap membutuhkan penyesuaian pada kemampuan Pemerintah Kabupaten Demak dalam memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Pendekatan dalam pelaksanaan Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi bersifat partisipatif. Pemberian kewenangan kepada penerima manfaat akan pelaksanaan pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat dijadikan sebagai subjek kebijakan bukan objek kebijakan. Pembangunan yang partisipatif ditujukan agar pelaksanaannya sesuai dengan kapasitas masing – masing penerima manfaat kebijakan. Sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan bantuan yang bersifat stimulan dan pemberian arahan teknis guna memastikan standar kelayakan hunian tetap terpenuhi. Maka berdasarkan pandangan

Subarsono, strategi pencapaian tujuan yang diterapkan dalam kebijakan pemberian bantuan pembangunan berkontribusi menjadi faktor pendukung dalam mencapai tujuan kebijakan.

KESIMPULAN

Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi belum berhasil memenuhi kebutuhan rumah layak huni di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Program relokasi yang diterapkan belum memenuhi aspek efektivitas, aspek efisiensi, aspek kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Bantuan Program Relokasi sebesar Rp50.000.000 hanya mencakup pengadaan material bangunan, sementara kebutuhan lain seperti pembelian lahan, pondasi, dan biaya tenaga kerja harus dipenuhi secara mandiri oleh penerima manfaat. Kondisi ini menyebabkan manfaat kebijakan sangat bergantung pada kemampuan finansial tambahan masyarakat serta belum mampu sepenuhnya menutup kebutuhan riil pembangunan hunian layak. Di sisi lain, persyaratan administratif dan kebutuhan modal tambahan membuat akses terhadap program lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang memiliki kapasitas ekonomi dan kepemilikan lahan. Kondisi tersebut menyebabkan program relokasi belum berguna bagi seluruh warga terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Faktor penghambat Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi yaitu kompleksitas tujuan kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Kompleksitas tujuan memperluas cakupan program melampaui kewenangan pelaksana, sementara keterbatasan anggaran dan sarana tanpa dukungan pusat

membatasi pemenuhan rumah layak huni. Di sisi lain, faktor sosial seperti keterikatan tempat tinggal dan keterbatasan ekonomi memicu resistensi masyarakat untuk relokasi.

SARAN

Adapun saran yang diberikan pada kebijakan pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana guna memenuhi kebutuhan rumah layak huni di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak meliputi:

1. Membangun Kerangka Kerja dan Sinergitas Lintas Sektor
Membentuk tim lintas sektor yang melibatkan Dinas Perumahan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas PUPR, dan LSM. Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin, laporan terpadu, dan platform digital untuk memantau progres dan menyelesaikan kendala.
2. Memperluas Sumber Pembiayaan melalui Kemitraan dengan Sektor Swasta
Optimalisasi CSR melalui MoU dengan skema pendanaan bersama dalam menyediakan lahan, material dan infrastruktur.
3. Menggencarkan Edukasi terkait Program Relokasi
Menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat relokasi. Sosialisasi melalui pertemuan warga, media cetak ataupun melalui media digital yang dilengkapi modul modul edukasi terkait transformasi sosial dan peluang ekonomi yang dapat diperoleh pasca relokasi.
4. Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Pasca Relokasi
menggandeng lembaga pelatihan kerja dan LSM guna menyusun program pemberdayaan masyarakat pasca relokasi sesuai potensi di tempat hunian baru

seperti pemberdayaan pelaku usaha ikan asap, pertanian organik dan kerajinan tangan berbasis bahan lokal (eceng gondok, bambu), dan pendampingan akses modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia)*. https://www.researchgate.net/profile/Muh-Akbar-5/publication/324079382_Studi_Evaluasi_Kebijakan_Evaluasi_Beberapa_Kebijakan_Di_Indonesia/links/5abc7aeeca27222c7537bff/Studi-Evaluasi-Kebijakan-Evaluasi-Beberapa-Kebijakan-Di-Indonesia.pdf
- Al-Zuhdi, M. R., & Hakim, K. (2023). Evaluasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Di Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Ilmiah Widyanata*, 20(2). <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyanata/article/view/1151/966>
- Amindoni, A. (2020). *Perubahan Iklim: Kisah Keluarga Yang Bertahan Sendirian Di Tengah Desa Yang Tenggelam - Bbc News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51354895>
- Berkunjung Ke Desa Timbulsloko Yang Dikepung Air Laut Di Demak - Antara News*. (N.D.). Retrieved January 26, 2026, From <https://www.antarane.ws.com/Berita/4135803/Berkunjung-Ke-Desa-Timbulsloko-Yang-Dikepung-Air-Laut-Di-Demak>
- Bohari, A. J., Puspasari, P., Wilopo, Maarif, S., & Rahardi, C. S. (2021). Evaluasi Kebijakan Pemulihan Sektor Permukiman Pasca Bencana Dengan Metode Cipp (Studi Kasus:

- Gempabumi Pidie Jaya). *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 12(1).
https://www.researchgate.net/publication/362429541_Evaluasi_Kebijakan_Pemulihan_Sektor_Pemukiman_Pasca_Bencana_Dengan_Metode_Cipp_Studi_Kasus_Gempabumi_Pidie_Jaya
- Desmet, K. (2024). *Adapting To Climate Change: Moving Goods Or Moving People?**.
www.parisschoolofeconomics.eu
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi Dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru .
http://eprints.umpo.ac.id/11631/1/Buku_Ajar_Kebijakan_Publik.Pdf
- Erosi Pantai Demak Terparah, Habis 2 Ribu Hektare-Mundur 5 Km. (N.D.). *Cnn*. Retrieved March 2, 2026, From
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015094756-199-708120/Erosi-Pantai-Demak-Terparah-Habis-2-Ribu-Hektare-Mundur-5-Km>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., & Sukmana, D. J. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Cv. Pustaka Ilmu Group.
- Hsiao, A., Almagro, M., Balboni, C., Bilal, A., Bryan, G., Castro-Vincenzi, J., Desmet, K., Duranton, G., Gaubert, C., Harari, N., Kalouptsidi, M., Kreindler, G., Levy, A., & Nagy, D. (2025). *Sea Level Rise And Urban Adaptation In Jakarta*.
- Iriawan, H. (2024). *Teori Kebijakan Publik*. Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup.
https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/394/1/Teori_Kebijakan_Publik.Pdf
- Jumlah Industri Dan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*. (N.D.). Badan Pusat Statistika. Retrieved March 2, 2026, From
<https://jateng.bps.go.id/id/statistiks-table/2/mjy5nsmy/jumlah-industri-dan-tenaga-kerja-menurut-kabupaten--kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Khairullah, K. K., & Indrayanti, A. R. E. (2024). Studi Luasan Genangan Banjir Rob Akibat Kenaikan Muka Air Laut Dan Penurunan Muka Tanah Di Kecamatan Sayung, Demak. *Indonesian Journal Of Oceanography*, 6(4), 306–315.
<https://doi.org/10.14710/ijoc.v6i4.24645>
- Mardiah, & Syarifuddin. (2018). Model-Model Evaluasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 2(1).
<http://yudafauzy.blogspot.co.id/>,
- Marwiyah, S. (N.D.). *Kebijakan Publik*. Retrieved March 2, 2026, From
http://repository.upm.ac.id/3995/1/Buku_Kebijakan_Publik_2022..Pdf
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (M. Nizar (Ed.)). Cv. Anugrah Utama Raharja.
- Mukhollis, A., & Siagian, S. A. M. (2023). *Bab 5 Solusi Adaptif Dampak Kenaikan Muka Air Laut*.
<https://doi.org/10.55981/brin.901.C720>
- Nelpanus, Mahfuzat, & Rusdin Rusmawaty. (2025). Implementasi Kebijakan Relokasi Penduduk Pada Zona Merah Rawan Tsunami Di Kelurahan Lere Kota Palu. *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan (Jsip)*, 1(4).

- Nurprasetyarani, S. Z., & Suwitri, S. (2025). Evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang. *Journal Of Management And Public Policy*, 14(2), 456–475. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v14i2.50632>
- Pamungkas, A. F., Nugroho, W. H., & Yudiana, B. (2024). Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir Pekalongan Melalui Mitigasi Bencana Dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan Iptek*, 20(2). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4669701>
- Pasolong, H. (N.D.). *Teori Administrasi Publik*.
- Pesisir Demak Terancam Tenggelam Pada 2030 | Tempo.Co.* (2025). <https://www.tempo.co/foto/arsip/pesisir-demak-terancam-tenggelam-pada-2030-1653020>
- Prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8), 901–907. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i8.298>
- Pratama, J., & Jusri, M. Y. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori Dan Praktik*. Insan Cendekia Mandiri.
- Pratama, Y. J. (N.D.). *Implementasi Pelayanan Publik*. Retrieved December 20, 2025, From www.insancendekiamandiri.co.id
- Ramadhani, N. A., Manurung, S. B., & Halawa, E. C. (2024). Evaluasi Kebijakan Program Perumahan Bersubsidi Di Kota Tanjungpinang: Analisis Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Tahun 2023: *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 670–685. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i4.3942>
- Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model). *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>
- Renaldi, A. (2023, January 17). “The Sea Is Swallowing Us Whole”: How Sinking Land, Rising Sea Level Threaten Semarang Laborers | Pulitzer Center. *Pulitzer Center*. <https://pulitzercenter.org/stories/sea-swallowing-us-whole-how-sinking-land-rising-sea-level-threaten-semarang-laborers>
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak 2025 - 2045.* (2024). Kaupaten Demak.
- Sarvina, Y., Surmaini, E., Lilik, Supriatin, S., Sarvina, Y., Surmaini, E., & Supriatin, L. S. (2023). *Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Prioritas*. <https://doi.org/10.55981/brin.901.c716>
- Sinulingga, D. M. (2021). *Diskresi Kebijakan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Pada Program Relokasi Permukiman*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/44347>
- Stufflebeam, D. L. ., & Zhang, G. (2017). *The Cipp Evaluation Model : How To Evaluate For Improvement And*

- Accountability*. The Guilford Press.
- Sugiyono. (N.D.). Metode Penelitian Kualitatif. *Alfabeta*.
- Supriatna, A., Sunarsi, D., & Permatasari, R. I. (2025). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Pt Literasi Nusantara Abadi Grup. [https://Repository-Penerbitlitnus.Co.Id/Id/Eprint/463/1/Buku_Ajar_Metode_Penelitian_Kualitatif.Pdf](https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/463/1/Buku_Ajar_Metode_Penelitian_Kualitatif.Pdf)
- Suryanti, N. M. W. A., & Marfai, M. A. (2025). *Analisis Multibahaya Di Wilayah Pesisir Kabupaten Demak*. [https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/228650-Analisis-Multibahaya-Di-Wilayah-Pesisir-A2e628aa.Pdf](https://media.neliti.com/media/publications/228650-analisis-multibahaya-di-wilayah-pesisir-a2e628aa.pdf)
- Warman, W., Komariyah, L., & Khairunnisa, F. U. K. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3(Se), 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>
- Wibowo, A. M. (2023). Analisis Strategi Relokasi Permukiman Warga Dukuh Simonet Akibat Banjir Pasang Surut Air Laut (Rob). *Kajen: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan*, 7(02), 64–75. <https://doi.org/10.54687/jurnalkajenv7i02.02>
- Widanti, N. P. T. (2022). *Prinsip Administrasi Publik*. Jagat Langit Sukma.
- Wu, P. C., Wei, M., & D'hondt, S. (2022). Subsidence In Coastal Cities Throughout The World Observed By Insar. *Geophysical Research Letters*, 49(7). <https://doi.org/10.1029/2022gl098477>
- Wulandari, N., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2022). Evaluasi Kebijakan Relokasi Rumah Nelayan Di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur. *Journal Of Management And Public Policy*, 11(2), 336–353. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i2.33579>
- Zahira, D. Z. (2024). *Studi Dampak Penurunan Muka Tanah Terhadap Banjir Rob Menggunakan Metode Dinsar Danchange Detection Di Kawasan Pesisir Kabupaten Demak Tahun 2020 Sampai 2023*.